

ANEUK MEUDAGANG

DAN TRANSFORMASI PELEMBAGAAN DAYAH : STUDI ETNOGRAFI DI KABUPATEN BIREUEN, ACEH¹

ANEUK MEUDAGANG AND TRANSFORMATION OF DAYAH INSTITUTION : STUDY ON ETHNOGRAPHY IN BIREUEN DISTRICT, ACEH

Teuku Kemal Fasya²

Email: kemal_antropologi2@yahoo.co.uk

ABSTRAK

Sejak diberlakukannya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terutama pada pasal 16 ayat (2), pasal 125, dan pasal 218 terkait kewenangan pemerintah mengelola pendidikan yang menunjang pengembangan Syariat Islam, pendidikan keislaman, termasuk pendidikan dayah, maka pelebagaan pendidikan dayah menjadi sentral dalam proyek pembangunan masyarakat. Konsep pendidikan dayah sesungguhnya telah termaktub di dalam Qanun No. 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang kemudian diamandemen ke dalam Qanun No. 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh. Regulasi itu semakin otonom dengan disahkannya Qanun No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Meskipun di era pascakonflik dan tsunami pelbagai regulasi telah dihadirkan untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan dayah, beberapa konsep kultural tentang pendidikan dayah tidak serta-merta menjadi semakin baik. Salah satu yang hilang dan rapuh dalam konsep antropolinguistik pendidikan dayah modern adalah penyebutan *aneuk dagang* atau *aneuk meudagang* untuk santri atau murid. Terminologi generik lokal ini tidak lagi digunakan di dayah-dayah, termasuk yang masih beraliran salafiyah atau tradisional. Dengan pendekatan etnografi, tulisan ini mencoba melakukan penggalan konseptual tentang istilah *aneuk meudagang* di Kabupaten Bireuen, termasuk melihat konsep dayah sebagai lembaga pendidikan Islam khas Aceh pada era terkini.

Kata kunci : aneuk meudagang, pelebagaan pendidikan dayah, etnografi, Bireuen

ABSTRACT

Since the enactment of The Bill of Republic of Indonesia No. 11 of 2006 on the Governing of Aceh, especially article 16 paragraph (2), article 125, and article 218 relating to the government's authority to manage education that supports the development of Islamic Sharia and Islamic education including dayah education, the institutionalization of dayah education is central in community development projects. The concept of dayah education has actually been contained in Qanun No. 5 of 2008 concerning Implementation of Education which was

¹ Diterima 14 Oktober 2019. Direvisi 27 Oktober 2019

² Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

later amended to Qanun No. 11 of 2014 on the Implementation of Education in Aceh. The regulation became more autonomous when Qanun No. 9 of 2018 on the Implementation of Dayah Education was passed. Although various regulations have been established to strengthen the organization of dayah education in the post-conflict and tsunami era, some cultural concepts about dayah education do not necessarily get better. One that is missing and fragile in the anthropolinguistic concept of modern dayah education is the mention of *aneuk dagang* or *aneuk meudagang* for dayah students. This local generic terminology is no longer used in dayahs, including in *salafiyah* or traditional dayah. Using ethnographic approach, this paper attempts to provide a conceptual exploration of the term *aneuk meudagang* in Bireuen District, including investigating the concept of dayah as a typical Islamic educational institution in Aceh in the current era.

Key words : *aneuk meudagang* (islamic internship student), institutionalization of dayah, ethnography, Bireuen.

A. PENDAHULUAN

Penelitian tentang dayah atau pesantren di Aceh saat ini mulai menjadi kajian penting untuk memahami genealogi dan konstruksi keislaman di Aceh. Seperti diketahui sejarah perkembangan Islam juga diikuti dengan peran pendidikan Islam, yang pada masa lalu diproduksi di dayah. Bahkan fungsi dayah di masa lalu memiliki fungsi sama pentingnya dengan *meunasah* atau mesjid yang berdiri di tiap *gampong* di Aceh.³

Keistimewaan dayah tidak bisa disamakan dengan madrasah yang ada di India, meskipun India dianggap sebagai salah satu titik migrasi muslim pertama ke Nusantara. Bahkan jika dilihat antara faktor penyebar dan perkembangan, institusi pendidikan Islam di Aceh jauh lebih cepat berkembang dibandingkan institusi pendidikan di Asia Selatan.

Beberapa indikatornya terlihat pertama, pada catatan Marcopolo. Dari dokumentasinya, Islam di Aceh telah menjadi sebuah peradaban dan kekuatan politik dengan kehadiran sebuah kerajaan yang kemudian dianggap sebagai tertua di Asia Tenggara, yaitu Pasai. Kerajaan itu berdiri sejak 1267 dengan raja Hindu, Meurah Silue yang kemudian masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Sultan Malikussaleh.⁴

Demikian pula pada pendidikan dayah. Sebuah *gampong* dekat dengan "Kerajaan" Perlak ditemukan sebuah dokumen sejarah yang menyebutkan telah terbentuk sistem pendidikan Islam berbasis komunitas seperti dayah pada

³ C. Snouck Hurgronje, Aceh : Rakyat dan Adat-Istiadatnya , terj. Sutan Maimoen (Jakarta : INIS, 1996), hal. 50. Di situ digambarkan bahwa bangunan dayah *gampong* lebih mencolok dibandingkan dengan rumah milik penduduk.

⁴ Robert Pringle, *Islam in Indonesia : Politic and Diversity* (Singapore : Editions Didier Miller, 2010), hal. 23.

abad kesembilan yang disebut Al Zawiyah Cot Kala.⁵

Kata “zawiyah” ini sendiri merujuk kepada sebuah tempat di Basrah, yaitu “zaiyah”, yaitu sebuah tempat tempat penampungan bagi kaum sufi dan miskin. Perkumpulan itu kemudian melakukan pendalaman filosofis tentang problem-problem keislaman yang muncul saat itu. Kata “zawiyah” memengaruhi secara antropolinguistik pembentukan kata “dayah” di Aceh, yang diartikan tempat pendidikan tradisional Islam untuk kaum bersahaja. Di Jawa dikenal dengan istilah pesantren.⁶

Kedua, seturut dengan itu, secara kronologis sistem pendidikan dayah jauh lebih tua dibandingkan pendidikan madrasah di India pada 1867, yang menurut John Bowen, antropolog agama asal Amerika Serikat dianggap sebagai sistem pendidikan Islam tertua di dunia.⁷ Sekolah yang dinamakan dengan Daru’l- ‘Ulum yang berada di kota Deoband, di wilayah utara-tengah India itu telah menggunakan sistem kurikulum, pembagian dan kenaikan kelas, dan pemberian hadiah bagi yang menjadi juara di setiap angkatan.

Dalam sistem pendidikan klasik di dayah, awalnya tidak mengenal

model kurikulum seperti yang dipahami saat ini. Kurikulum ditentukan oleh guru yang juga menyeleksi bahan bacaan yang dianggap sesuai bagi masyarakatnya. Pada sistem klasik, sang guru (*teungku*) mengajarkan semua mata pelajaran. Demikian pula belum dikenal pola penjenjangan kelas.

Pada abad ke-16, sistem dayah di Aceh di Aceh mulai berkembang, meskipun murid yang ingin belajar agama masih mencari gurunya dan mengabdikan dengan model *ta’lim al-muta’alim* (pedagogik skolastik) di pondok pendidikan. Itu misalnya ditemukan di bekas dayah Teungku Awe Geutah, Bireuen, yang kabarnya telah terbangun pada masa Sultan Ali Mughayatsyah.⁸

Panjangnya sejarah dayah ini membuktikan bahwa produksi pengetahuan keislaman melalui lembaga itu tidak dapat dipinggirkan. Meskipun pada masa Aceh kontemporer, pengetahuan Islam diproduksi oleh perguruan tinggi Islam seperti STAIN, IAIN, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang berjejer di banyak kabupaten/kota seluruh Aceh, peran dayah tidak terpinggirkan.⁹

⁵

https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Zawiyah_Cot_Kala_Langsa. Diakses pada 2 Oktober 2019. Lokasi asli Al Zawiyah Teungku Cot Kala terletak di daerah Bayeun, Aceh Timur.

⁶ “Tentang Zawiyah (1)”, *Republika*, 24 Oktober 2012.

⁷ John Bowen, *A New Anthropology of Islam* (Cambridge : Cambridge University Press, 2012), hal. 27.

⁸ Tidak ada referensi dokumentatif yang cukup meyakinkan tentang Tgk Awe Geutah yang berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng. Kisah ini akhirnya digali melalui penuturan keturunannya. Wawancara dengan Teungku Muhsin, keturunan Teungku Awe Geutah pada 28 Juli 2019. Sayangnya kisah kemegahan Dayah Teungku Awe Geutah kini tinggal kenangan. Dayah dulu itu kini hanya menjadi tempat pengajian (*balee seumebeut*) bagi ibu-ibu di sekitar *gampong*.

⁹ Nama UIN Ar-Raniry sendiri bukan tokoh kecil dalam sejarah pengetahuan Islam di Aceh. Bernama asli Nur Al-Din Muhammad

B. METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode sosial kualitatif. Metode penelitian kualitatif termasuk galib digunakan dalam lapangan kajian antropologi atau yang mengikuti model penelitian filosofis seperti fenomenologi. Metode ini juga memiliki konsep rigoritas layaknya pada kuantitatif, yaitu menuntut adanya pengumpulan data dan analisis yang penggunaannya memberikan hasil memuaskan.¹⁰ Data-data yang dianalisis baik berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sebagai teknik penggalian utama.¹¹

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap apa yang terjadi di sebuah fenomena atau realitas yang sebelumnya sangat sedikit diketahui. Pada skala yang lebih luas metode kualitatif ini berhubungan dengan masalah perilaku manusia dan fungsinya, yang dapat mengungkap baik perilaku organisasi, kelompok, dan individu, sehingga dapat memberikan

nuansa kedalaman tentang makna sebuah kejadian atau realitas.

Metode ini akhirnya sangat dekat dengan pendekatan *grounded theory*, fenomenologi, dan etnografi sehingga dapat menyelidiki sejarah kehidupan sebuah komunitas (*life histories*) dan analisis percakapan masyarakat.¹²

Pendekatan etnografi yang digunakan dalam tulisan ini adalah agar pembaca mendapatkan gambaran induktif yang utuh tentang fenomena di kehidupan dayah dari kasus Kabupaten Bireuen. Seperti diketahui bahwa pendekatan etnografi akan memberikan pandangan yang dalam (*in-depth look*) atas sebuah kasus.¹³ Dengan pendekatan ini hasil yang didapatkan tidak hanya akan memberikan gambaran kasuistik yang diteliti yaitu Kabupaten Bireuen, tapi dapat dideduktivikasi untuk fenomena dayah di Aceh secara umum. Meskipun demikian, ada beberapa kaidah yang harus dilihat dalam penelitian ini.

Pertama, riset ini terbatas pada lokasi tertentu yaitu Bireuen. Dalam pendekatan etnografi, Bireuen tidak hanya dilihat sebagai sebuah *locus*

bin 'Ali bin Hasanji Al-Hamid Al-Syafi'i Al-Aydarusi Al-Raniri adalah seorang tokoh sufi dan mujadid yang lahir di Ranir (saat ini disebut kota Randir), sebuah kota pelabuhan di Gujarat, India. Meskipun ia dilahirkan di kota India ia lebih dimasukkan sebagai ulama Melayu daripada India atau Arab. Ia memiliki ibu Melayu dan ayah yang berasal dari imigran Hadrami yang memiliki tradisi panjang berpindah dari Asia Selatan ke Asia Tenggara. Ia memiliki pengaruh pemikiran sufistik dan fiqh yang kuat di tanah Melayu pada abad 17 bersama tokoh lain seperti Hamzah Al-Fansury, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan Abdurrauf As-Singkili, yang kemudian di menjadi "mazhab Islam Aceh". Tak heran jika akhirnya namanya dipilih sebagai nama perguruan tinggi negeri tertua

di Aceh. Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* cet. II (Jakarta : Kreasindo, 2004), hal. 199-202.

¹⁰ Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research* (London - New Delhi : Sage Publications, 1990), hal. 19.

¹¹ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 157.

¹² Anselm Strauss and Juliet, *Basics of Qualitative., op cit.*, hal. 21.

¹³ Karen O'Reilly, *Ethnography Methods*, (London : Routledge-Abingdon, 2004), hal. 5.

administrasi yang terbentuk oleh undang-undang dan sistem pemerintahan yang berbeda dari kabupaten induknya, yaitu Aceh Utara, tapi juga ada aspek budaya, adat-istiadat, tradisi, "keyakinan" yang harus dilihat secara khusus. Pendekatan etnografi akan melihat Bireuen sebagai *ethnos* yang khusus dan unik. Jadi tidak akan bersikap simplisistik yang mengarah kepada induktivisme.¹⁴

Kedua, dalam era keberlimpahan data atau *big data* saat ini, penelitian sosial-kualitatif yang dianggap akurat tetap memerlukan kunjungan lapangan. Tulisan ini hadir setelah melakukan pemutakhiran "pandangan" dan melakukan observasi secara langsung di beberapa dayah yang terdapat di Kabupaten Bireuen.

Adapun terkait dengan penelitian lapangan untuk penulisan ini dilakukan pertama sekali pada April - Mei 2018. Fase tersebut adalah pengumpulan data primer awal baik dalam bentuk observasi dan wawancara. Namun diperlukan keberulangan turun di lapangan untuk mendapatkan kedalaman (*iterative-inductive research that evolves in design through the study*).¹⁵ Makanya dilakukan *up date*, baik kunjungan lapangan maupun penelusuran data sekunder melalui studi dokumen dan literatur, yang berlanjut hingga penulisan artikel ini pada Oktober 2019.

Salah satu data dalam penelitian lapangan sosial kualitatif adalah observasi. Observasi (partisipatif?)

bertujuan agar bahan yang dihadirkan bukan semata data-statistikal (bahkan hal ini pun bisa dianggap sekunder), tapi memberikan pemahaman tentang dunia sosial yang sedang dibentangkan kepada pembaca, sehingga tanpa observasi tidak akan ada narasi yang hidup, simbolisme kegiatan, dan maksud-maksud khusus yang bisa dipahami secara jernih oleh orang luar. Etnografi memberikan keterlibatan penelitian menjadi semakin dekat dengan waktu (*riset*), teknik pengumpulan data sekunder, dan observasi. Observasi memberikan nuansa yang lebih induktif tentang apa yang dihasilkan di lapangan.¹⁶

Ketiga, dalam penelitian etnografi tentang *aneuk meudagang*, penulisannya menggunakan data yang bergulir, "belum final", dan terus berkembang. Pengertian belum final ialah penelitian etnografi pasti selalu terbuka pada detail-detail dan penemuan baru dalam menggambarkan fenomena sosial-budaya. Fenomena sosial budaya ialah terus dinamis dan berubah.

Demikian pula pada penulisan. Para etnografer kerap menulis secara *writing up* dibandingkan *writing down*. Maksudnya, teknik penulisan tidak hanya bertumpu pada yang ditemukan selama penelitian lapangan, baik saat observasi ataupun transkrip catatan, tapi dikembangkan dengan data dan referensi lainnya, termasuk yang di luar fase penelitian lapangan.¹⁷ Makanya penulis masih terus melakukan pengembangan atau berpikir reflektif

¹⁴ *Ibid*, hal. 21.

¹⁵ *Ibid*, hal. 3.

¹⁶ Paul Aktinson and M. Hammersley. "Ethnography and participant observation."

Strategies of Qualitative Inquiry (Thousand Oaks: Sage, 1998), hal 248-251.

¹⁷ O'Reilly, *Ethnographic.*, *op cit.*, hal. 175.

hingga detik-detik tulisan ini diguratkan.

Beberapa asumsi yang disiapkan di dalam *outline* pasti terbongkar agar sesuai dengan harapan dan imajinasi tulisan – yang bisa juga tidak akan final – untuk membuka ruang *writingly* bagi pembaca untuk dikembangkan lebih lanjut. Dalam hal ini, etnografi memberikan ruang jawaban atas masalah itu, yaitu memproduksi tulisan yang memperlihatkan “birat-birat” kekhususannya, bersifat naratif dan reflektif.¹⁸

C. HASIL PENELITIAN

Dayah dalam Sejarah Islam di Bireuen
Keberadaan dayah sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Nusantara dan Asia telah tercatat di dalam sejarah. Posisi Bireuen sebenarnya masuk dalam daya edar peradaban Pasai, yang saat itu masuk dalam poros penyebaran Islam, yang sebagian besar dibawa oleh pedagang yang berasal dari Yaman, Persia, Tiongkok, India Barat (Gujarat), dan Champa (Vietnam).¹⁹ Posisi penting Aceh bukan saja pada pesisir Timur, tapi juga pesisir Barat yang menghasilkan rempah-rempah dan bahan-bahan yang diperlukan untuk pengawetan mayat dan pengharum

seperti kamper atau kapur barus dari Singkil.²⁰

Posisi penting Bireuen dalam lintasan sejarah penyebaran Islam di Aceh disebabkan letaknya di Selat Melaka yang menjadi jalur tersibuk yang menghubungkan wilayah dari Laut Arab dan Teluk Bengal menuju Nusantara dan Laut China Selatan. Karenanya proses penyebaran agama-agama besar di dunia pasti melewati wilayah Aceh. Posisi ini juga disebut sebagai salah satu jalur perdagangan sutera.²¹

Sebenarnya ada beberapa versi yang menunjukkan tentang penyebaran Islam di Nusantara. Namun sumber yang paling kuat menunjukkan Aceh sebagai lokasi pertama datangnya Islam. Dalam catatan Marcopolo, pelawat dari Portugis, ketika mengunjungi Sumatera (1292), menemukan “kerajaan” Islam di wilayah Perlak (Aceh Timur) yang bertanggal 840 M yang menurutnya diislamkan oleh pedagang dari Saracen.²² Sebelumnya telah ada bukti tentang kerajaan Islam awal yang merupakan kerajaan Hindu pada 1211, yaitu Lamreh di ujung utara pulau Sumatera (kini wilayah Aceh Besar).

Namun dari pelbagai riset dan kongres sejarah tentang Kerajaan Islam, disepakati fakta kerajaan Islam pertama di Nusantara ialah Kerajaan Pasai

¹⁸ Harold Garfinkel, *Studies in Ethnometodology* (New Jersey : Pentice Hall Inc, 1967), hal. 9.

¹⁹ Teuku Kemal Fasya, “Dimensi Islam Nusantara”, *Kompas*, 4 Agustus 2015.

²⁰ Teuku Kemal Fasya, “Identitas Terbelah Singkil dan Ambiguitas Toleransi” dalam Ahmad Suaedy, *Intoleransi, Revitalisasi Tradisi,*

dan Tantangan Kebinekaan Indonesia (Depok : Abdurrahman Wahid Centre - Universitas Indonesia (AWC-UI), 2017), hal. 39.

²¹ Nurbaiti, *Aceh Gerbang Masuknya Islam ke Nusantara* (Tangerang : Mahara Publishing, 2016), hal. 2.

²² Anthony Reid, *Sumatera Tempo Doeloe : Dari Marcopolo hingga Tan Malaka* (Depok : Komunitas Bambu, 2010), hal. 8.

dengan raja pertamanya adalah Malikussaleh (1267-1290). Nama aslinya adalah Meurah Silue. Ia menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Namun seperti penelusuran Marcopolo, beberapa kerajaan yang berada di sekitar Kerajaan Pasai masih beragama Hindu atau pagan.

Salah satu wilayah yang dikunjungi Marcopolo saat itu adalah wilayah Basman atau Peusangan yang saat itu belum ditaklukkan Kerajaan Pasai. Di wilayah ini saat itu belum terpengaruh ajaran Islam, sehingga masih merupakan masyarakat barbar dan belum menganut sistem hukum yang mengatur urusan publik.²³

Pada masa kolonial, Bireuen masih menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Utara atau sering disebut juga wilayah Pasai. Bireuen memiliki sejarah otonomi daerah yang panjang. Jika merujuk pada surat Keputusan Vander Geuvernment General Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Pemerintah Hindia Belanda membagi daerah Aceh atas enam Afdeeling (Kabupaten) yang dipimpin seorang Asistent Resident. Salah satunya adalah Afdeeling Noord Kust Van Aceh (Kabupaten Aceh Utara) yang meliputi Aceh Utara sekarang hingga Kecamatan Bandar Dua yang kini telah termasuk Kabupaten Pidie.²⁴

Afdeeling Noord Kust Aceh dibagi dalam tiga Onder Afdeeling (Kewedanaan) yang dikepalai seorang Countroleur (Wedana) yaitu : 1. Onder Afdeeling Bireuen 2. Onder Afdeeling Lhokseumawe 3. Onder Afdeeling

Lhoksukon Selain Onder Afdeeling tersebut terdapat juga beberapa Daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur).

Daerah pecahan Aceh Utara ini juga dikenal sebagai kota juang. Beragam kisah heroik terekam dalam catatan. Benteng pertahanan di Batee Ilikek merupakan daerah terakhir yang diserang Belanda yang menyisakan kisah kepahlawan pejuang Aceh dalam menghadapi Belanda.²⁵

Pada awal penjajahan Belanda, wilayah Bireuen termasuk kuat dalam perjuangan melawan serdadu kaphe. Kisah heroik itu terbaca dengan adanya di makam kuburan delapan (kubu syahid lapan) di Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen. Pelintas jalan Medan-Banda Aceh, sering menyinggahi tempat ini untuk ziarah. Mereka wafat pada tahun 1902 saat diserang pasukan Marsose, Belanda.

Kala itu delapan syuhada tersebut berhasil menewaskan pasukan Marsose yang berjumlah 24 orang. Namun, ketika mereka mengumpulkan senjata dari tentara Belanda yang tewas itu, mereka diserang oleh pasukan Belanda lainnya yang datang dari arah Jeunieb.

Kedelapan pejuang itu pun syahid. Mereka adalah Tgk Panglima Prang Rayeuk Djurong Bindje, Tgk Muda Lem Mamplam, Tgk Nyak Bale Ishak Blang Mane, Tgk Meureudu Tambue, Tgk Balee Tambue, Apa Syekh Lantjok Mamplam, Muhammad Sabi Blang Mane, serta Nyak Ben Matang Salem Blang Teumeuleuk.²⁶

²³ *Ibid.*

²⁴ Badan Pusat Statistik, *Aceh Utara dalam Angka 2016*, hal. xlix.

²⁵ <http://www.bireuenkab.go.id/single-list/sejarah/>. Diakses pada 4 Oktober 2019.

²⁶ *Ibid.*

Sebagai pusat pendidikan Islam, Bireuen telah juga terlihat sejak era kolonial Belanda. Salah satunya ialah sejarah lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Pada bulan Mei 1939, terlaksananya konferensi tentang tentang standarisasi pendidikan dan sekolah-sekolah Islam di Perguruan Tinggi Islam, Peusangan. Pemilik sekolah itu adalah Teungku Abdurrahman Meucap, yang berhasil mengumpulkan ulama-ulama berpengaruh dari pantai barat dan timur Aceh. Saat itu berdirilah PUSA dengan diketuai Teungku Muhammad Daud Beureueh, wakil ketua Teungku Abdurrahman Meucap, sekretaris Ismail Yakoub yang sekaligus menjadi pemimpin redaksi *Penjoeloeh* yang juga bertempat di Bireuen.²⁷

Di samping Aceh Besar, Pidie, dan Meulaboh yang telah dikenal sebagai tempat rintisan pendidikan Islam modern di Aceh, juga dikenal kota Bireuen yang memiliki ratusan dayah atau pendidikan Islam tradisional. Di Bireuen saat itu tidak terjadi pertentangan yang dalam, antara kelompok Islam modern dengan Islam tradisional, sehingga gerakan Islam politik, Islam kultural-tradisional, dan gerakan Islam modern - yang diwakili dengan Muhammadiyah - bisa hidup berdampingan tanpa terjadi konflik bernuansa sektarian yang melahirkan prahara kemanusiaan.²⁸

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke konsep Negara Republik Indonesia. Setelah masa RIS, Undang Undang Dasar Sementara 1950 tidak diberlakukan lagi dan saat seluruh

negara bagian bergabung dan statusnya berubah menjadi provinsi. Aceh yang pada saat itu bukan negara bagian, digabungkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom setingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, terbentuklah Daerah Tingkat II Aceh Utara yang juga termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Hampir dua dasawarsa kemudian dikeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sebutan Kepala Perwakilan diganti dengan Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sehingga daerah perwakilan Bireuen berubah menjadi Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara di Bireuen.

Pada era pasca-reformasi, Bireuen menjadi kabupaten tersendiri setelah lepas dari Aceh Utara selaku kabupaten induk pada 12 Oktober 1999 melalui Undang Undang Nomor 48 tahun 1999. Kabupaten Bireuen terletak pada jalur Banda Aceh - Medan yang diapit tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Utara yang membuat Bireuen menjadi daerah transit yang maju.

Pada era konflik pasca-tsunami sebelum perdamaian Helsinki, 15 Agustus 2005, Bireuen telah melakukan praktik hukuman cambuk. Hukuman cambuk yang dilakukan itu berkaitan praktik hukum pidana Islam (*hukm al-jinâyat*). Hukuman cambuk itu didasarkan pada Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

²⁷ Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat : Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 58-59.

²⁸ *Ibid*, hal. 60-61.

dan Qanun No. 13 tahun 2003 tentang Maisir atau Judi. Pemberlakuan saat itu sempat melahirkan kontroversi karena dianggap sebagai perilaku melawan hak asasi manusia (HAM). Saat itu mata dunia sedang mengarah ke Aceh setelah terjadi tsunami dan keberadaan NGO internasional yang ikut membantu Aceh, bukan hanya pada masalah rekonstruksi fisik tapi juga pemulihan sosial-budaya.

Hukuman cambuk itu dilakukan pada 24 Juni 2005 di depan Masjid Raya Bireuen. Kelima belas terdakwa yang terbukti sah melakukan perjudian akhirnya dihukum cambuk. Sebelas orang yang lain masih menunggu pelaksanaan hukum karena dianggap tidak cukup sehat untuk menerima cambukan. Seremoni ini dihadiri oleh seluruh jajaran Muspida NAD, termasuk pejabat gubernur Azwar Abubakar.²⁹

Meskipun hukuman cambuk itu masuk pada aspek pidana (*jinayah*), dan bukan bagian dari pendidikan (*tarbiyah/ta'lim*), tapi di Bireuen berkaitan-erat. Praktik hukum cambuk itu dianggap bagian dari mengembangkan pendidikan Islam salaf (konservatisme Islam), di samping juga mempraktikkan hukum pidana (*jinayah*) bagi pelaku pelanggaran qanun. Gagasan pemberlakuan hukuman cambuk itu erat kaitannya dengan

desakan ulama di Bireuen agar pemerintah menjalankan hukum Syariat Islam secara *kaffah*. Sesuatu yang ironi, karena bupati yang memberlakukan hukuman cambuk pertama di Aceh itu, akhirnya terbelit kasus korupsi.³⁰

Secara etnografis masyarakat Bireuen dianggap memiliki latar-belakang etnik dan agama yang beragam. Namun secara kultural, Bireuen terbentuk homogen. Daerah ini dianggap sebagai salah satu kabupaten yang konsisten menjalankan Syariat Islam dan kuat menabalkan dirinya sebagai daerah santri atau kota seribu satu dayah. Julukan ini menjadi identitas yang dapat dipahami tentang konservatisme Islam di wilayah Bireuen. Jika pada masa lalu tradisionalisme Islam di Bireuen dapat mengakomodasi perbedaan politik, tapi di era modern, konservatisme itu terkadang menyulut konflik kekerasan. Hal itu dapat dilihat terjadinya kasus kekerasan dalam melawan ajaran sesat seperti terhadap Teungku Ayuib, aliran Millata Abraham,³¹ dan juga serangan di Samalanga yang menasar kalangan Muhammadiyah.³²

Adapun kultur Islam tradisional kontemporer di Bireuen terlihat bernuansa konservatif dan cenderung keras diakibatkan beberapa faktor. Salah satunya karena daerah ini menjadi wilayah berbasis konflik, sehingga

²⁹ Teuku Kemal Fasya, "Hukum Cambuk dan Keadilan", *Kompas*, 25 Juni 2005. Yang menarik adalah pernyataan salah seorang terdakwa dalam sebuah wawancara. "Saya rela menjadi contoh pertama dari pelaksanaan hukuman Syari'at Islam di Aceh, tapi saya tidak ingin menjadi yang terakhir. Saya ingin melihat para koruptor yang begitu banyak di Aceh dikenai hukuman cambuk".

³⁰ "Berkas Mustafa Glanggang Segera Dilimpahkan ke Kejaksanaan", *kompas.com*, 21 Januari 2008.

³¹ "Kasus Aliran Sesat di Bireuen Mengkhawatirkan", *Serambi Indonesia*, 12 Desember 2012.

³² "Tak Sesuai Aswaja, Fondasi Masjid Muhammadiyah Aceh Dibakar", *CNN Indonesia*, 18 Oktober 2017.

residu konflik di masa lalu masih bertahan hingga era damai. Daerah yang sangat terdampak Daerah Operasi Militer (DOM) seperti Aceh Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur, termasuk yang kemudian menjadi bagian dari pemekaran akibat otonomi khusus seperti Lhokseumawe dan Bireuen, cenderung terpapar kultur kekerasan dan intoleran. Situasi yang tidak stabil pascareformasi, terutama ketika masa ketika gejolak sosial seperti era kampanye referendum juga ikut memunculkan aksi-aksi kekerasan bernuansa agama, yang digunakan masyarakat sipil dalam penegakan moral masyarakat atau Syariat Islam. Gambaran ini menunjukkan silang budaya dalam perkembangan Islam di Bireuen yang tidak tunggal. Hal itu ikut mewarnai keberadaan dayah.

Pelebagaan dan Statistika Dayah di Bireuen

Keberadaan dayah di Aceh tidak dapat dilepaskan dari kehadiran UU No. 11 tahun 2006. Pada pasal 16 ayat (2) misalnya, Aceh diberikan kewenangan penuh dalam melaksanakan Syariat Islam. Bahkan secara konstitusional sejarah pelembagaan Syariat Islam di Aceh termasuk yang tertua di Indonesia jika dilihat dari sejarah perdamaian pasca-konflik Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang muncul

pada awal 50-an dan berakhir dengan pemberian Daerah Istimewa Aceh dengan pengelolaan Syariat Islam.³³

Pada pasal 125 UU No. 11 tahun 2006 membicarakan tentang cakupan Syariat Islam di Aceh, yaitu meliputi syar'iyah, aqidah, dan akhlak. Ketiga prinsip itu diderivasi ke dalam beberapa praksis operasional, salah satunya adalah tarbiyah atau pendidikan. Konsep itulah yang kemudian dikembangkan di dalam Qanun No. 5 tahun 2008 dan kemudian direvisi ke dalam Qanun No. 11 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh, yang secara konsep tidak membedakan antara pendidikan umum dan agama, bahkan diberikan keistimewaan pada pendidikan dayah. Pada pasal 218 UU No. 11 tahun 2006 jelas disebutkan, bahwa pendidikan dayah eksis, baik sebagai pendidikan formal dan non-formal.

Regulasi itu sesungguhnya endapan ekspresi dari sejarah pendirian dayah di Aceh. Jika dilihat secara genealogis, pendidikan dayah di Aceh memang telah hidup sebagai proses untuk mengembangkan dimensi spiritual, akhlak, dan sosial disamping intelektual. Tujuannya agar seseorang dapat mengembangkan kehidupannya dengan baik, tidak semata-mata sebagai pusat pengetahuan dan laboratorium ilmiah untuk membuat lompatan

³³ Salah satu argumentasi yang dapat dibaca adalah tulisan Michelle Ann Miller, peneliti dari National University of Singapore. Dalam tulisannya *What's Special about Special Autonomy in Aceh!* (2006), dijelaskan sebab kehadiran pemberontakan DI/TII seperti di beberapa wilayah di Indonesia seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Barat karena pemerintah Jakarta dianggap pemerintahan sekuler dan menjauh dari semangat Piagam Jakarta. Meskipun Aceh bukan yang pertama

mencetuskan DI/TII, Aceh menjadi daerah terakhir yang bisa diredam pemberontakannya. Salah satu "kunci rekonsiliasi pascakonflik" ialah pemberian daerah otonomi dengan pengelolaan Syariat Islam, termasuk di bidang pendidikan keislaman. Baca Michelle Ann Miller dalam Anthony Reid, *Verandah of Violence : The Background to the Aceh Problem* (Singapore : Singapore University Press, 2006), hal. 292-314.

paradigma pengetahuan agama atas masalah-masalah sosial dan kekinian, tapi juga pembentukan moral agama anak didik.

Meskipun demikian, konsep moral yang diajarkan cenderung mengonservasi nilai-nilai yang telah dianggap baik di masa lalu untuk diteruskan di masa sekarang. Sesungguhnya fenomena itu tidak hanya di Aceh tapi juga di dunia pendidikan Islam tradisional manapun seperti dunia pesantren di pulau Jawa. Bagaimanapun Islam di Nusantara yang berkembang saat ini dipengaruhi daerah asal wilayah penyebar seperti Afrika Utara (Al-Maghribi), Mesir, Syria, Irak, Yaman, India, dan Haramain sendiri.³⁴

Keberadaan dayah sebagai bagian dari penyebaran pendidikan Islam tradisional "ideal", bertujuan mengajarkan ilmu yang mengandung "kelezatan-kelezatan rohaniah" agar sampai pada hakikat ilmiah dan akhlak terpuji. Ini pula yang menjadi tonggak dari penghormatan pendidikan dayah yang telah ada di Aceh selama 1100 tahun yang dimulai dengan keberadaan dayah tertua, yaitu Cot Kala, kemudian bertransformasi menjadi lembaga "pemberdayaan masyarakat dan gerakan sosial".³⁵

Dari penelusuran sejarah oral disebutkan tokoh-tokoh pejuang dari Aceh dalam melawan kolonialisme Belanda juga dilakukan oleh tokoh dayah seperti Teungku Chik Di Tiro, Teungku Chik Kuta Karang, Teungku

Fakinah, Teungku Daud Bereu-eh berasal dari dunia dayah. Di antara tokoh-tokoh ulama besar Aceh abad 19, terdapat seorang sosok perempuan yaitu Teungku Fakinah. Ia lahir sekitar tahun 1856 M dari Gampong Lam Beunot Aceh Besar. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, juga seorang ulama besar waktu itu. Ini yang membedakannya dengan pahlawan perempuan lainnya. Dari catatan Ali Hasjmy menyebutkan bahwa Teungku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum Perang Aceh meletus, dia sudah membangun dayah. Usai perang, dayah tersebut kembali dilanjutkan. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar.³⁶

Fenomena perempuan di dayah juga terlihat di Bireuen, bukan saja di dayah terpadu seperti di Dayah Az-Zahra di Kecamatan Juli, tapi juga di dayah tradisional seperti Al-Madinatuddiniyah Babussalam, Kecamatan Jeumpa, atau yang lebih dikenal sebagai Dayah Blang Bladeh. Para pengajar perempuan di dayah juga dipanggil dengan "teungku". Salah satu teungku yang mengabdikan diri di dayah ini adalah Nur Azizah. Nur Azizah awalnya adalah santri di dayah ini. Setelah selesai pendidikan, ia melanjutkan mengabdikan diri di dayah. Ia termasuk tidak digaji oleh yayasan dan hanya mendapatkan insentif yang sangat rendah jika dirasiokan dengan

³⁴ Azumardi Azra, *Jaringan Ulama., op cit.*, hal. 385.

³⁵ Mukhlisuddin Ilyas, *Pendidikan Dayah di Aceh Mulai Hilang Identitas* (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2012), hal. 13.

³⁶ *Republika*, 17 Januari 2018.

keperluan per kapita per bulan. Tapi pengabdianya yang besar menyebabkan tetap bertahan di dayah ini. Dari itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan dayah di Bireuen tidak diskriminatif. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan agama.³⁷

Dasar pembentukan Badan Dayah, disamping (UUPA) No. 11 Tahun 2006, juga Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh, yang kemudian diamandemen menjadi Qanun No. 11 tahun 2014 dan kemudian diubah lagi menjadi Qanun No. 9 tahun 2015 sebagai perubahan qanun pendidikan sebelumnya. Kehadiran qanun pendidikan akhirnya memberikan efek domino, memacu lahirnya qanun khusus yang mengurus masalah dayah yaitu Qanun No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.

Salah satu yang menjadi perhatian terkait kehadiran Badan Penyelenggara Pendidikan Dayah Aceh adalah perbaikan mutu dan kualitas dayah, baik prasarana, kurikulum, manajemen dan peningkatan kualitas santri serta memberdayakan dayah sesuai dengan letak geografis dayah. Kemudian sejak itu dibentuklah Badan Dayah di tingkat kabupaten kota untuk

melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur dan mutu pendidikan. Di antara yang menjadi program prioritas ialah pembentukan dan pengembangan *ma'had 'ali* (perguruan tinggi dayah), akreditasi dayah, peningkatan profesionalisme manajemen dayah, dan peningkatan kompetensi guru.

Di Bireuen, salah satu daya genjot peningkatan kualitas dayah ialah hadirnya Perbup No. 40 tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan Dayah. Perbup ini sekaligus melakukan akreditasi atas dayah-dayah di Bireuen yang berjumlah 126 dayah dengan pelbagai tipe. Dari survei tersebut hanya 67 dayah lulus akreditasi dari tipe A hingga D. Adapun yang lainnya belum memenuhi syarat, terutama syarat santri yang mondok, dan juga dibedakan dengan *balee seumebeut*.³⁸ Demikian pula jumlah santri minimal di sebuah tempat pendidikan dayah yaitu paling kurang 10 orang yang mondok. Di bawah itu tidak bisa disebut sebagai dayah.³⁹

Beberapa dayah yang terakreditasi memiliki jumlah santri yang menetap sangat minimal seperti Babul Mustaqim (13 santri), Raudhatul Istiqamatuddin Serambi Aceh (15 santri), dan Munawwarah Al-Aziziyah (16 santri).⁴⁰ Lembaga pendidikan Islam atau dayah yang memiliki santri minimal sebagian besar adalah lembaga yang baru muncul setelah Badan Pendidikan Dayah didirikan. Salah satu penyebabnya adalah terbukanya akses

³⁷ Wawancara dengan Teungku Nur Azizah, guru di Dayah Al-Madinatuddiniyah Babussalam Putri, Kecamatan Jeumpa, Bireuen, 15 April 2018.

³⁸ Nazaruddin Abdullah dkk, *Buku Profil Dayah Terakreditasi tahun 2017* (Bireuen : Dinas

Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen, 2017), hal. 14.

³⁹ Wawancara dengan Jakfar, sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Bireuen, 13 April 2018.

⁴⁰ Abdullah dkk, *Buku Profil.*, op cit., hal. 31.

yang mudah bagi dana penyelenggaraan pendidikan dayah yang jumlahnya juga cukup besar.

Besaran anggaran Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama lembaga ini hadir, pada 2008 BPPD Aceh mendapat anggaran sebesar Rp. 178 miliar, kemudian meningkat pada tahun 2009 sebesar Rp. 223 miliar. Anggarannya sempat menyusut pada tahun 2010 menjadi Rp. 107 miliar dan kembali berkurang pada tahun 2011 menjadi Rp. 98 miliar. Namun pada tahun 2012 dananya kembali meningkat Rp. 136 miliar, tahun 2014 sebesar Rp. 230 miliar dan puncaknya pada tahun 2015 menjadi Rp. 376 miliar.⁴¹

Besarnya anggaran pada BPPD (sekarang telah berubah menjadi Dinas Pendidikan Dayah) menyebabkan hasrat untuk membangun dayah dari perspektif ekonomi menjadi tinggi. Itu pula penyebab hadirnya beberapa dayah “abal-abal”, sehingga muncul kesimpulan bahwa ini akibat tata kelola Dinas Pendidikan Dayah yang buruk. Salah satu indikator terlihat pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pemberian dana bantuan, antara Dinas dengan penerima manfaat (pihak dayah).⁴²

⁴¹

<https://dpd.acehprov.go.id/index.php/news/read/2016/10/24/13/kiprah-dan-kontribusi-badan-pembinaan-pendidikan-dayah-aceh.html>. Diakses pada 8 Maret 2019.

⁴² Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh mengungkapkan fakta tentang adanya kutipan ilegal atau pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pejabat di Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Besaran pungli yang dilakukan adalah Rp. 15 juta per dayah, sehingga terkumpul dana sebesar Rp.400-500 juta dari praktik haram tersebut. Hal ini menunjukkan

Dari data di atas terlihat, bahwa dayah yang berafiliasi dengan Al-Aziziyah memiliki relasi kuat dengan Dayah Mudi Mesjid Raya Samalanga. Dayah Mudi sendiri menjadi salah satu dayah tertua (1927) yang paling berpengaruh, dan masih berjalan hingga sekarang. Karena itu pula pengaruh Samalanga dalam sistem kekerabatan di dayah di Bireuen tidak dapat dianggap kecil. Bahkan bukan hanya di Bireuen tapi hingga seluruh Aceh. Jaringan saat ini menjadi kekuatan utama dalam kepengurusan wilayah pada Nahdlatul Ulama di Aceh.⁴³

Demikian pula dengan keberadaan dayah putri. Dari hasil penelitian terlihat bahwa dayah-dayah putri banyak telah berumur tua seperti Darul Atiq (1923) dan Babussalam (1964). Dayah tersebut dirintis sebagai dayah yang berfokus pada pendidikan Islam bagi perempuan, yang menjadi salah satu tonggak perjuangan dan pengetahuan Islam Aceh sejak era kolonial hingga Orde Lama, atau pada fase awal pasca-kemerdekaan.⁴⁴

Dilema Istilah Aneuk Meudagang

Istilah *aneuk meudagang* atau *aneuk dagang* sebagai sebutan klasik untuk santri ternyata tidak memiliki sejarah yang cukup memadai dalam

bahwa kinerja Dinas Pendidikan Dayah yang sebelumnya masih dalam bentuk Badan tidak semakin membaik.“GeRAK Ungkap Dugaan Pungli Dana Hibah Pesantren oleh Oknum Pejabat Dinas Dayah, Ini Totalnya”, *Serambi Indonesia*, 16 November 2018.

⁴³ Wawancara dengan Dr. Danial Murdani, dosen IAIN Lhokseumawe dan Ketua Alumni Ikatan Alumni Sunan Kalijaga Aceh, 18 September 2019.

⁴⁴ *Republika*, 17 Januari 2018.

pelbagai literatur. Dalam salah satu literatur klasik karya Dr. Snouck Hurgronje, *De Atjehers* (1893), sebutan untuk santri digunakan saat itu ialah murid. Pada karya itu Hurgronje menggunakan kata “murid” untuk para pelajar yang berkhitmad di dayah. Dari buku itu disebutkan konsep dayah ialah tempat ibadah atau tempat belajar ilmu agama di *gampong*. Konstruksi bangunannya memiliki ruangan yang mirip relung batu sebagai mehrab yang menunjuk ke arah kiblat; Kabah di Mekah.⁴⁵

Kata murid sendiri memiliki akar dari bahasa Arab yang artinya “orang yang menginginkan”. Secara etimologis kata murid dalam bahasa Arab ialah “*tilmidzun*” (تلميذ), sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia memiliki sinonima dengan kata “siswa” atau “pelajar”. Kata “murid” diderivasi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya sama artinya dengan “*tilmidzun*” dalam bahasa Arab. Istilah ini yang kemudian hidup dan digunakan di dalam pergaulan di dunia dayah klasik di Aceh.

Namun, istilah ini masih digunakan, salah satunya pada *Buku Profil Dayah Terakreditasi* (2017). Buku itu menggunakan istilah *santri meudagang*. Istilah yang digunakan pun tidak murni dengan istilah *aneuk dagang* atau *meudagang*, tapi sudah terpengaruh dengan sebuah istilah yang mulai galib muncul sejak era 80-an, terutama ketika bermunculan dayah terpadu atau pesantren modern di Aceh seperti

Bustanul Ulum di Langsa atau Jeumala Amal di Pidie Jaya.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Dayah Bireuen, istilah “*santri meudagang*” dimaksudkan untuk santri bersahaja yang tinggal dalam waktu tidak terbatas di sebuah dayah, yaitu rata-rata dayah salafi.⁴⁶ Mereka inilah yang kemudian menjadi guru di tempat almahaternya sebagai wujud pengabdian, yang rela mengajar meskipun tidak dibayar (*voluntary activities*).

Sebutan *santri meudagang* ini dipisahkan maksudnya dengan santri yang belajar di Tempat Pengajian Alquran (TPA), majelis taklim, atau santri malam.⁴⁷ Jelas pengertian *santri meudagang* adalah santri yang mandiri menghidupi dirinya di rantau. Adapun untuk keperluan sehari-hari ia mengandalkan pada kerja sampingan atau kiriman dari keluarganya yang sebagian dijadikan sebagai modal usaha. *Santri meudagang* kira-kira memiliki maksud yang sama dengan istilah *aneuk dagang*.

Menurut Teungku H. Muhammad Amin atau lebih dikenal dengan panggilan Abu Tumin pimpinan Dayah Al-Madinatuddiniyah Babussalam, istilah yang ia kenal ialah *ureung meudagang* atau *aneuk meudagang*.⁴⁸ Istilah itu digunakan untuk para santri yang merantau dan tinggal di dayah. Istilah ini tidak digunakan untuk santri yang mondok di *gampongnya* sendiri. Ia memilih menuntut ilmu ke dayah lain, untuk

⁴⁵ Hurgronje, *Aceh.*, *op cit.*, hal. 49.

⁴⁶ Meskipun ada yang membedakan istilah dayah salafi dan salafiyah, pada penulisan di sini kedua istilah itu tidak dibedakan maksud maknanya, yaitu dayah tradisional atau non-dayah modern.

⁴⁷ Abdullah dkk, *Buku Profil.*, *op cit.*, hal. 28.

⁴⁸ Wawancara dengan Abu Tumin, 16 April 2018.

memperdalam pengetahuan agama sekaligus mengasah kemampuan wirausaha dan daya tahannya secara mental-spiritual sebelum terjun di masyarakat luas sebagai calon ulama.

Menurut Abu Tumin ada banyak istilah yang dipakai dalam penyebutan subjek yang menuntut ilmu agama. Untuk tingkat anak-anak disebut *aneuk mit meurangkang* atau anak belia yang belajar mengaji di balai (*balee*) *gampong*-nya. *Balee* itu menurut Snouck Hurgronje, bukan saja berfungsi untuk belajar mengaji, tapi juga untuk membuat acara bersyair agama atau barzanji yang masa lalu disebut tradisi *rateb pulot* atau *rateb seudati*.⁴⁹

Istilah *aneuk meudagang* dikenal di dayah Al-Madinatuddiniyah sebagai salah satu dayah tertua di Bireuen.⁵⁰ Dayah ini telah berdiri pada masa kolonial Belanda, yang dirintis oleh Teungku H. Imam Hanafiah, yang tak lain kakek dari Abu Tumin.⁵¹ Dayah ini kemudian dilanjutkan kepemimpinan oleh ayahnya yaitu Teungku Mahmudsyah. Sepeninggal ayahnya, Abu Tumin mengambil alih estafeta pendidikan di dayah ini yang konsisten di jalur tradisional atau salafi yang bukan saja menekankan pada

pendidikan nahwu-syaraf, fiqh, tafsir, dan hadist, tapi juga ilmu “non agama” seperti ilmu perdagangan, ilmu qadhi atau tatalaksana pernikahan, ilmu sosial-ekonomi, perzakatan, dsb.

Meskipun demikian, dayah yang memiliki 1.200 santri putra ini tidak secara konsisten menggunakan istilah *aneuk meudagang*. Mereka juga menggunakan istilah santri. Dayah ini termasuk salah satu pionir dayah salafi yang memiliki jaringan di pelbagai tempat di Aceh dengan menggunakan nama Al-Madinatuddiniyah, seperti juga Darussa’adah di Teupin Raya dan juga Al-Aziziyah di Samalanga.

Namun, sebagian besar dayah lainnya seperti Dayah Terpadu Az-Zahra di Kecamatan Juli, yang semakin diminati baik dari putra-putri wilayah Bireuen, juga daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah tidak mengenal istilah ini. Mereka sejak awal pendirian menggunakan istilah santri bagi pelajarnya. Demikian dengan dayah tradisional yang kini telah berkembang menjadi dayah terpadu, yaitu Dayah Tanoh Mirah, Kecamatan Peusangan, Bireuen, tak lagi mengenal istilah *aneuk meudagang*.

⁴⁹ Hurgronje, *Aceh*., *op cit.*, hal. 49.

⁵⁰ Wawancara dengan Teungku Akmal Hadani, pengurus di Dayah Al-Madinatuddiniyah Babussalam, 18 April 2018.

⁵¹ Ada satu dokumen yang menyebutkan dayah ini telah berdiri sejak 1890. Saat penulis melakukan wawancara Abu Tumin tidak menyebut secara persis tanggal dan hanya menyebut bahwa dayah ini telah ada sejak masa kolonial Belanda, yang bisa jadi penanggalannya dari sejak 1914, sebagai tahun berakhirnya perang Belanda dan dimulainya kolonialisasi yang ditandai hadirnya proyek

pembangunan Belanda di Aceh. Di antara yang pertama dikerjakan adalah pembangunan infrastruktur kereta api dan jalan raya Sumatera (*longitudinalen weg*) yang dilaksanakan dua tahun setelah pasifikasi (penaklukan Aceh), 1916. Lihat Anthony Reid, *An Indonesian Frontier : Acehnese and Other Histories of Sumatera* (Singapore : Singapore University Press, 2005), hal. 29-30. Atau hingga 1942-1949, yaitu tahun terakhir berkuasanya Belanda di Indonesia. Lihat Dr. A.J. Piekaar, *Aceh dan Peperangan dengan Jepang*, terj. Aboebakar cet.II (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1998).

Pimpinan Dayah Tanoh Mirah, Teungku Al-Ghazaly, yang merupakan pimpinan ketiga setelah ayahnya, Teungku H. Abdullah Hanafi dan abangnya Teungku Muhammad Wali Al-Khalidi atau dikenal dengan sebutan Abun Tanoh Mirah, menyebutkan sejak ia menjadi santri pada 80-an, tak lagi mendengar istilah *aneuk dagang* atau *aneuk meudagang*. "Walaupun istilah itu dari Jawa, tetap kami gunakan istilah santri. Kalaupun dihidupkan kembali istilah *aneuk dagang*, tidak akan berhasil, karena memang tidak lagi menjadi bagian percakapan di era sekarang. Apalagi saat ini sudah digalakkan hari santri, sehingga istilah di masa lalu itu tersebut tidak lagi relevan."⁵²

Kenyataan ini dapat dijelaskan secara antropinguistik. Bahwa kehadiran sebuah istilah pada kurun tertentu memiliki pesan makna yang berhubungan dengan praktik sosial yang terjadi pada masa tersebut. Ia dapat hilang atau kabur dalam percakapan masyarakat ketika tak lagi memiliki peran interpretatif yang signifikan.⁵³ Dalam konteks *aneuk meudagang* dianggap telah kehilangan *historical relation* dengan mental dunia nyata saat ini. Para santri saat ini telah masuk dalam kepraktisan dunia pendidikan kontemporer, walaupun ia dayah salafi. Istilah *aneuk meudagang* tidak lagi memiliki *sense* dan *reference* di dunia pendidikan dayah saat ini. Jika pun masih ada pengakuan digunakan,

hanya bersifat romantisisme yang tidak cukup kuat dalam wacana lisan.

PENUTUP

Dengan demikian jelaslah bahwa istilah *aneuk meudagang* menjadi tidak populer bukan disebabkan oleh sebuah sikap politis atau politisasi istilah seperti yang terjadi di era Orde Baru dalam mengontrol bahasa yang digunakan di dalam masyarakat,⁵⁴ tetapi karena pengaruh perkembangan pesantren yang berasal dari Jawa. Pengaruh ini bisa disebut sebagai pengaruh positif yang menjadi penanda menjamurnya pendidikan Islam tradisional di seluruh Nusantara.

Sebagai pendidikan Islam tradisional yang asli Nusantara, *dayah* atau pesantren ditengarai merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan pada masa sebelum Islam datang, sebuah sistem pedagogik yang berangkat dari kearifan lokal, sehingga mampu menyerap banyak kebaikan dari sistem pendidikan tradisional yang berbasis komunitas. Karenanya, dayah selain identik dengan keislaman juga dekat dengan makna keaslian Indonesia (*indigenously islamic education*), sehingga dipercaya menjadi salah-satu sistem pendidikan yang efektif sejak era prakemerdekaan Indonesia.⁵⁵

Karenanya, dalam sejarah perjalanannya, dayah atau pesantren berhasil melakukan upaya

⁵² Wawancara dengan Abu Al-Ghazaly, 17 April 2018.

⁵³ Ninuk Kleden-Probonegoro, "Bahasa Sebagai Model Metode Penelitian Humaniora : Sudut Pandang Hermeneutik" dalam Ignas Kleden dan Taufik Abdullah, *Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Penelitian : Ilmu-ilmu Sosial Humaniora di Indonesia* (Jakarta : LIPI, 2017), hal. 472-473.

⁵⁴ Salah satu karya yang cukup representatif bicara tentang politisasi kata dan istilah adalah buku Benedict R.O'G Anderson, *Kuasa-Kata : Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia* (Yogyakarta : Mata Bangsa, 2016).

⁵⁵ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina 1997), hal. 33.

kontekstualisasi ajaran Islam dengan budaya lokal. Kalangan pesantren seperti juga yang hidup dalam tradisi dayah salafi, mampu menampilkan dan mentransformasikan Islam yang dapat bersentuhan mesra dengan nilai-nilai, keyakinan, dan ritual lokal.

Meskipun demikian, tidak semua upaya revitalisasi konsep-konsep keislaman di Aceh bisa bertahan dan berkembang. Jika konsep dayah dapat menyesuaikan secara resilientif dengan kultur pendidikan Aceh kontemporer, tidak demikian halnya dengan istilah *aneuk meudagang*. Istilah ini secara arkeologis telah terbenam di ceruk sejarah pendidikan tradisional di Aceh. Istilah yang secara atavistik merupakan bagian dari bahasa Aceh ini tidak bertahan karena fungsi-fungsi linguistiknya memang tidak memadai lagi. Salah satunya adalah problem di dayah sendiri, karena *tradisi meudagang* atau permagangan (*internship*) tidak cukup hidup di dayah salafi saat ini. Sebaliknya tradisi permagangan yang ada di dayah modern tidak lagi menggunakan istilah *ureung meudagang* atau *aneuk meudagang*.

DAFTAR PUSTAKA:

Buku

- Abdullah, Nazaruddin dkk. 2017. *Buku Profil Dayah Terakreditasi tahun 2017*, Bireuen : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
- Anderson, Benedict R.O'G. 2016. *Kuasa-Kata : Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*, Yogyakarta : Mata Bangsa.
- Aktinson, Paul and M. Hammersley. 1998. "Ethnography and participant observation." *Strategies of Qualitative Inquiry*, Thousand Oaks: Sage.

- Bowen, John. 2012. *A New Anthropology of Islam*, Cambridge : Cambridge University Press.
- Fasya, Teuku Kemal, Ismar Ramadani, dan Norma Susanti Manalu. 2018. *Keberanian yang Pahit : Perempuan dan Masa Depan Pendidikan Dayah di Aceh*, Tangerang : Mahara Publishing.
- Garfingkel, Harold. 1967. *Studies in Ethnometodology*, New Jersey : Pentice Hall Inc.
- Hurgronje, C. Snouck. 1996. *Aceh : Rakyat dan Adat-Istiadatnya*, terj. Sutan Maimoen, Jakarta : INIS.
- Kleden, Ignas dan Taufik Abdullah. 2017. *Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Penelitian : Ilmu-ilmu Sosial Humaniora di Indonesia*, Jakarta : LIPI.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina.
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Nurbaiti, 2016. *Aceh Gerbang Masuknya Islam ke Nusantara*, Tangerang : Mahara Publishing.
- O'Reilly, Karen. 2004. *Ethnographic Methods*, London : Routledge-Abingdon.
- Piekaar, Dr. A.J. 1998. *Aceh dan Peperangan dengan Jepang*, terj. Aboebakar cet.II, Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Pringle, Robert. 2010. *Islam in Indonesia : Politic and Diversity*, Singapore : Editions Didiet Miller.
- Reid, Anthony. 1987. *Perjuangan Rakyat : Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

- Reid, Anthony, 2005. *An Indonesian Frontier : Acehnese and Other Histories of Sumatera*, Singapore : Singapore University Press.
- Reid, Anthony. 2010. *Sumatera Tempo Doeloe : Dari Marcopolo hingga Tan Malaka*, Depok : Komunitas Bambu.
- Reid, Anthony. 2006. *Verandah of Violence : The Background to the Aceh Problem*, Singapore : Singapore University Press.
- Spradley, J.P. 2007. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. 1990. *Basics of Qualitative Research*, London - New Delhi : Sage Publications.
- Suaedy, Ahmad. 2017. *Intoleransi, Revitalisasi Tradisi, dan Tantangan Kebinekaan Indonesia*, Depok : Abdurrahman Wahid Centre - Universitas Indonesia (AWC-UI).
- Thompson, Paul. 1979. *The Voice of the Past : Oral History*, Oxford : Oxford University Press.
- Wahid, Marzuki dkk (ed.). 1999. *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Willis, Paul. 2000. *Ethnographic Imagination*, Oxford : Blackwell Publisher.
- pembinaan-pendidikan-dayah-aceh.html. Diakses pada 8 Maret 2019.
- https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Zawiyah_Cot_Kala_Langsa. Diakses pada 2 Oktober 2019.
- kompas.com*. 2008. 21 Januari.
- Republika*. 2018. 17 Januari.
- Republika*, 2012. 24 Oktober.
- Serambi Indonesia*. 2018. 11 Oktober.
- Serambi Indonesia*. 2012. 12 Desember.
- Serambi Indonesia*. 2018. 16 November.
- Serambi Indonesia*. 2018. 16 November.

Media Massa dan Dokumen Lain

- Badan Pusat Statistik, Aceh Utara dalam Angka 2016.
- CNN Indonesia*. 2017. 18 Oktober.
- Fasya, Teuku Kemal. 2015. "Dimensi Islam Nusantara", *Kompas*, 4 Agustus.
- <http://www.bireuenkab.go.id/single-list/sejarah/>. Diakses pada 4 Oktober 2019.
- <https://dpd.acehprov.go.id/index.php/news/read/2016/10/24/13/kiprah-dan-kontribusi-badan->